

Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah 3T

Suhardi¹, Maria Ulfa Awaliah², Ratih Kusuma Dewi³, Ananda Reyva Nabilla⁴
^{1,2,3,4} Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta
e-mail: mrsuhardi12@gmail.com

Abstrak

Hingga saat ini kondisi akses pendidikan di Negara Indonesia masih belum merata ke tanah air, terutama di daerah 3T, masih terdapat disparitas yang sangat kompleks dalam pendidikan antar penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi yang berbeda-beda. Salah satu upaya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar di daerah 3T tersebut dengan terus meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan mengenai proses implementasi manajemen sarana dan prasarana untuk daerah 3T dan juga bagaimana mengolah hal tersebut agar berkembang secara pesat. Penulisan artikel ini menggunakan metode *library research*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pentingnya memanager sarana dan prasarana secara efektif di daerah 3T dengan melihat alasan yang jelas bukan hanya sekedar keinginan, membuat perencanaan yang matang dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah 3T, dan perlunya kolaborasi antar instansi pemerintah dan non-pemerintah, guna mendukung penyediaan serta distribusi sarana dan prasarana yang dibutuhkan di daerah 3T. Dengan begitu seluruh instansi dan petinggi di Indonesia dapat membantu menyetarakan mutu pendidikan pada daerah 3T.

Kata kunci: *Manajemen, Sarana, Prasarana, Paud, Daerah 3T*

Abstract

Until now, the condition of access to education in Indonesia is still not evenly distributed across the country, especially in the 3T areas, there are still very complex disparities in education between people living in households with different economic statuses. One effort to achieve the fulfillment of basic needs and basic service requirements in the 3T area is to continue to improve the quality of education by providing educational facilities and infrastructure that comply with national education standards. This research aims to provide information about the process of implementing facilities and infrastructure management for 3T areas and also how to process this so that it develops rapidly. This article was written using the library research method. The results of this research state that it is important to manage facilities and infrastructure effectively in the 3T area by looking at clear reasons, not just desires, making careful planning by involving stakeholders in the 3T area, and the need for collaboration between government and non-government agencies, in order to supports the provision and distribution of facilities and infrastructure needed in the 3T area. In this way, all agencies and senior officials in Indonesia can help equalize the quality of education in the 3T regions.

Keywords : *Management, Facilities, Infrastructure, Early Childhood Education, 3T Region*

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi ujung tombak bagi kemajuan sebuah bangsa, jika pendidikan dalam sebuah bangsa itu baik maka baik pulalah sumber daya manusianya, baik buruk nya pendidikan suatu bangsa bisa kita dari pelaksanaan serta orientasi sistem pendidikan

tersebut. Dengan begitu pendidikan merupakan investasi penting dan memiliki peranan yang strategis bagi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas (Yanti, 2022). Dengan adanya pendidikan dapat memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki, salah satu tempat untuk mengembangkan potensi peserta didik ialah di dalam sekolah. Sekolah merupakan sebuah wadah organisasi yang sangat kompleks dan jugu unik, kenapa bisa dikatakan demikian, karena di sekolahlah menjadi tempat proses belajar mengajar, dan di sekolah juga merupakan tempat bagi manusia untuk mendapatkan pendidikan agar memiliki pengetahuan di bidang spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan juga Negara, hal ini sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 3 tentang Pendidikan Nasional.

Pendidikan merupakan tolak ukur dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada sebuah generasi tak terkecuali di Indonesia. Terkait dengan kurang meratanya persebaran guru, sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut namun demikian upaya ini tampaknya masih kurang optimal di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) sehingga menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk ditengah-tengah perkembangan Globalisasi yang maju dan sangat pesat saat ini sehingga dengan ketiadaan dukungan sarana prasarana peralatan, tenaga kependidikan serta infrastruktur gedung sekolah yang memadai adalah kunci permasalahan yang menjadikan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia menjadi rendah (Tommy, 2021).

Keberhasilan program pendidikan dalam proses belajar mengajar dapat di pengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, serta dalam sistem pengelolaannya (Aldha, 2012). Menurut Subroto ada beberapa komponen sekolah yang dapat di perhatikan untuk mendukung pembelajaran di sekolah yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta pelayanan khusus lembaga pendidikan (Rahmi, 2021). Untuk mendukung tujuan dari pendidikan dan menyukkseskan pendidikan tentunya banyak faktor yang harus dipenuhi mulai dari sumber daya yang berkualitas sampai pada fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai.

Perkembangan zaman menuntut dunia pendidikan untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam rangka pencapaian kualitas pendidikan yang lebih baik, perlu adanya rangkaian yang saling terkait dan berkesinambungan, adanya faktor-faktor penunjang yang salah satunya adalah manajemen sarana prasarana pendidikan dengan baik. Keberadaan sarana dan prasarana dianggap menjadi peran sentral karena merupakan roda penggerak utama dalam berjalanya kegiatan pendidikam yang semua lapisan sekolah membutuhkannya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. *Library research* juga menjadi langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian guna memperoleh penelitian sejenis, memperdalam kajian teori atau mempertajam metodologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen Sarana dan Prasarana

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kehidupan itu membutuhkan pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai, anak-anak akan memiliki

kemampuan untuk memahami apa yang belum mereka ketahui sehingga mereka dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Selain itu, pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi anak sehingga mereka menjadi individu yang berkualitas. Faktor-faktor seperti kurikulum, metode pembelajaran, guru dan tenaga kependidikan, dan ketersediaan sarana dan prasarana adalah beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan siswa. Sumber daya manusia dan material yang memadai diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya adalah sarana dan prasarana yang digunakan sebagai sumber daya material untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan dengan baik (Rahayu, 2020).

Namun, tidak banyak sekolah yang memiliki fasilitas dan perlengkapan yang cukup. Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan yang tidak optimal adalah penyebabnya. akibatnya, tindakan yang dilakukan tidak mencapai hasil yang optimal. Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pendidikan sekolah dapat dipenuhi selama proses pengadaan, pengadaan sarana dan prasarana harus direncanakan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan. Sarana dan prasarana berfungsi untuk mendukung proses pendidikan. Dengan demikian, pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan optimal hanya jika dilakukan sesuai dengan tuntutan tingkat kebutuhan pendidikan di lembaga pendidikan yang terkait dan disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan manajemen sarana dan prasarana yang baik dan tepat. Sarana dan prasarana ini akan memudahkan proses belajar mengajar sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai (Rahayu, 2020).

Untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan lancar di sekolah, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang mengatur persiapan semua peralatan dan material yang diperlukan. proses pengajaran. Prasarana pendidikan mencakup semua item bergerak dan tidak bergerak yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Rohiat, 2010: 26)

Keseluruhan dari proses perencanaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana disebut manajemen sarana dan prasarana digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Manajemen sarana dan prasarana meliputi: proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan (Nadia et al. 2022).

1. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan yang menggambarkan proses perencanaan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai kebutuhan. Proses perencanaan merupakan langkah pertama dan utama yang perlu diperhatikan dengan teliti dan cermat terkait dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, jumlah, jenis, kendala, dan harganya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana agar dapat digunakan dengan baik dan mendukung proses belajar mengajar dengan benar.

Untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis tingkat kebutuhan. Hal ini disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah yang sebenarnya, kebutuhan sekolah, kemampuan anggaran sekolah, dan keyakinan yang jelas tentang rekomendasi dan sarana pendidikan yang akan digunakan. Komite sekolah, kepala sekolah dan wakilnya, serta pendidik dan tenaga kependidikan harus terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kematangan perencanaan dan mengurangi kesalahan (Rahayu. 2020)

2. Pengadaan

Setelah perencanaan sarana dan prasarana selesai, langkah selanjutnya adalah proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Proses ini adalah fungsi operasional kedua dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan dan mencakup serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan hasil perencanaan dengan tujuan untuk mendukung

kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. berdasarkan jenis ada beberapa alternatif yaitu di antaranya:

- 1) Pengadaan tempat
 - 2) Pengadaan bangunan; membangun bangunan baru; membeli bangunan, menyewa bangunan, menerima hibah bangunan
 - 3) Pengadaan alat; membeli, membuat sendiri, menerima hibah
 - 4) Pengadaan ATK pendidikan; membeli, menerima hibah atau daur ulang. (Rahayu. 2020)
3. Penyimpanan

Semua sumber daya pendidikan harus disimpan dengan baik. Penyimpanan ini dilakukan oleh petugas tertentu yang bertanggung jawab untuk menyimpan hasil pengadaan. Proses inventarisasi adalah bagian dari proses penyimpanan. Inventarisasi adalah pencatatan atau pendataan barang milik organisasi ke dalam daftar inventarisasi sesuai dengan aturan tertentu. Pengadministrasian seperti buku inventaris, buku pembelian, buku penghapusan, kartu barang, dan laporan pengadaan barang diperlukan untuk pengelolaan inventaris yang efektif.

Semua barang diberi kode untuk inventaris. Ini dilakukan untuk meningkatkan manajemen dan pengawasan aset lembaga. Menurut Gunawan dan Benty (2017), pencatatan dan pemberian kode untuk setiap sarana dan prasarana dimaksudkan untuk membuat semua pihak sekolah mudah mengenal kembali perlengkapan sekolah, baik dari segi kepemilikan maupun penanggung jawab dan pengawasan (Rahayu. 2020).

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga atau mencegah suatu barang rusak sehingga tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala upaya yang dilakukan setiap hari untuk memastikan bahwa peralatan tersebut tetap dalam kondisi baik. Pemeliharaan dimulai dengan menggunakan barang dengan hati-hati. Pemeliharaan barang khusus harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk melakukannya (Nadia et al. 2022).

Tujuan dari proses pemeliharaan adalah untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, memastikan kesiapan operasional peralatan untuk operasi yang lancar dan keselamatan penggunaannya. Pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan terus menerus, berskala, darurat, dan preventif di lingkungan pendidikan (Rahayu. 2020).

5. Penghapusan

Saat sarana dan prasarana pendidikan digunakan, kadang-kadang ditemukan rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Jika diperbaiki, perbaikannya akan sangat mahal, jadi lebih baik membeli yang baru daripada memperbaikinya. Untuk proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan diperlukan, yang merupakan tahap terakhir dari proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah proses menghilangkan, menghilangkan, atau mengeluarkan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventarisasi karena tidak berfungsi sesuai dengan harapan (Rahayu. 2020). Tujuan penghapusan sarana dan prasarana adalah untuk membebaskan pengelola atau bendaharawan barang dari pertanggung jawaban administratif dan fisik atas barang milik negara yang dimiliki atau diurus oleh mereka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Nadia et al. 2022)

Pengertian Daerah 3T

Daerah 3T merupakan singkatan dari daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar. Daerah 3T adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pembangunan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan tertinggal. Konsep ini diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan yang terpencil. Daerah 3T memiliki karakteristik yang khas, seperti akses terbatas terhadap infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja, dengan kondisi ini membuat masyarakat di

daerah 3T menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah khusus untuk memperbaiki kondisi di daerah 3T. Daerah 3T jumlahnya di Indonesia mencapai kurang lebih sekitar ratusan daerah. Setiap tahun nya, pemerintah berusaha untuk mengurangi jumlah daerah 3T dengan cara melakukan pemerataan infrastruktur dan ekonomi. Salah satu faktor suatu daerah termasuk kedalam kategori daerah 3T ialah terhambatnya atau terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga lemahnya penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur (Kintan,2020).

Daerah tertinggal adalah daerah yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek pembangunan. Berikut faktor yang menyebabkan daerah menjadi tertinggal antara lain : kurangnya investasi dalam infrastruktur, kurangnya akses terhadap layanan dasar, kurangnya peluang ekonomi. Dengan begitu tertinggal berarti memiliki kualitas pembangunan yang rendah, dimana masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, dan dari sisi geografis berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 mengenai penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 pasal 1 ayat (1) “yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional”, pada pasal 2 ayat (1) di paparkan bahwa “Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan beberapa kriteria yaitu : perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah”. Daerah tertinggal seringkali memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dan tingkat pengangguran yang tinggi pula, bahkan sampai masyarakat di daerah ini sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, air bersih, dan sanitasi yang layak (Ifan,2024).

Daerah terluar adalah daerah yang terletak di luar pulau-pulau utama Indonesia. Mengenai daerah-daerah terluar dapat kita ketahui dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau - pulau kecil terluar telah ditetapkan 92 dua pulau - pulau kecil terluar, lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik - titik garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah pulau - pulau kecil terluar, kemudian pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar terdapat 111 wilayah yang masuk dalam daftar pulau - pulau kecil terluar (Efipania,2021). Daerah terluar seringkali memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transportasi laut dan udara untuk menghubungkannya dengan daerah-daerah lain, hal inilah yang menyebabkan biaya transportasi yang relatif tinggi dan akses yang minim terhadap barang dan layanan. Selain itu, daerah terluar juga sering menghadapi tantangan dalam hal keamanan dan ketahanan pangannya (Prasya,2024).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah di daerah 3T ini. Adapun beberapa upaya yang dilakukan pemerintahan antara lain:

1. Program pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan
2. Program peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan
3. Program pengembangan ekonomi lokal
4. Program pemberdayaan masyarakat

Upaya-upaya inilah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah 3T dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Solusi dan Implementasi

Dalam penyelenggaraan PAUD, diperlukan manajemen sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas bagi peserta didik untuk penyelenggaraan pendidikan yang efektif.

Sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dinilai sangat jauh berbeda dengan sarana dan prasarana di kota. Misalnya seperti kurangnya tenaga pendidik, minimnya media pembelajaran dan sumber informasi, rusaknya meja dan bangku, bahkan bangunan sekolah yang hampir roboh. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi belajar peserta didik. Kurangnya tenaga pendidik ini merupakan permasalahan yang sering muncul. Hal ini dikarenakan sedikitnya tenaga pendidik yang ingin mengabdikan dirinya di daerah 3T, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta kualifikasi calon tenaga pendidik yang di bawah standar mutu. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendidikan yang belum memadai juga merupakan salah satu permasalahan yang umum terjadi.

Salah satu solusi untuk memperbaiki kondisi ini adalah melalui manajemen yang efektif terhadap sarana dan prasarana PAUD di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Manajemen sarana dan prasarana PAUD tidak hanya membangun infrastruktur atau menambah tenaga pendidik. Dalam pengadaan sarana dan prasarana, harus memiliki alasan jelas mengenai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan (Nurbaiti, 2015). Sehingga perlu perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang melibatkan semua pemangku kepentingan di daerah 3T untuk melakukan identifikasi kebutuhan yang spesifik, serta memprioritaskan berdasarkan urgensi dan potensi dampaknya terhadap peningkatan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran di wilayah tersebut.

Kolaborasi antar instansi melibatkan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, non-pemerintah, dan organisasi internasional guna mendukung penyediaan serta distribusi sarana dan prasarana yang diperlukan di daerah 3T. Contohnya, melalui program bantuan atau proyek bersama yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur sekolah, memperbaiki fasilitas, dan memastikan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan tenaga pendidik. Dalam kolaborasi dengan instansi pemerintah, diperlukan pengajuan prosopal pengadaan media penunjang seperti buku pelajaran, buku penunjang, serta alat-alat olahraga kepada pemerintah setempat atau pemerintah pusat. Namun, proposal yang diajukan sering kali tidak langsung disetujui karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Sehingga hal ini memakan waktu lama untuk menyelesaikan proposal.

Pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara lain: (1) Dropping dari pemerintah, yang merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah. Bantuan ini terbatas, jadi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan dengan cara lain. (2) Membeli sarana dan prasarana sekolah secara langsung atau melalui pemesanan terlebih dahulu; (3) Meminta sumbangan dari wali murid atau mengajukan proposal bantuan ke lembaga sosial yang tidak mengikat untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah; (4) Menyewa atau meminjam perlengkapan ke tempat lain; dan (5) menukar barang (Bafadal, 2004).

Selanjutnya adalah inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan berarti pencatatan atau pendaftaran barang-barang yang dimiliki oleh lembaga (sekolah) ke dalam daftar inventaris barang secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku (Matin, 2016). Inventaris ini dilakukan dalam upaya meningkatkan manajemen dan pengawasan barang milik negara atau swasta. Selain itu, inventarisasi juga dilakukan agar mengetahui jumlah barang yang digunakan dan barang yang sudah tidak terpakai sehingga dapat menjadi acuan untuk pengadaan barang selanjutnya.

Pendistribusian sarana prasarana juga perlu dilakukan. Pendistribusian sarana dan prasarana sekolah ini merujuk pada proses distribusi atau penyaluran berbagai fasilitas yang diperlukan sekolah, seperti meja, kursi, papan tulis, serta peralatan lainnya. Dalam pendistribusian juga diperlukan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Pemeliharaan ini dilakukan secara berkala setiap satu atau dua kali dalam setahun. Pemeliharaan sarana dan prasarana perlu dilakukan secara terencana agar: (a) sarana dan prasarana selalu dalam kondisi fungsi pakai yang baik, (b) memperpanjang usia sarana dan prasarana, (c) menjaga keamanan dan kenyamanan murid, (d) mengetahui adanya kerusakan kecil untuk menghindari terjadinya kerusakan (Nurbaiti, 2015).

Pemantauan dan evaluasi sistematis sangat penting untuk menilai efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Dengan mengawasi kinerja dan hasil secara teratur, area-area yang perlu perbaikan dapat teridentifikasi dan dapat dilakukan penyesuaian yang tepat untuk meningkatkan kondisi dan pemanfaatan fasilitas sekolah.

SIMPULAN

Keberhasilan program pendidikan dalam proses belajar mengajar dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, serta dalam sistem pengelolaannya (Aldha, 2012). Dalam penyelenggaraan PAUD, manajemen sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung efektivitas pendidikan. Di Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), kondisi sarana dan prasarana sering jauh berbeda dengan di kota, dengan tantangan seperti minimnya tenaga pendidik, kurangnya media pembelajaran, serta infrastruktur sekolah yang memprihatinkan. Solusi untuk mengatasi ini melibatkan perencanaan matang yang melibatkan semua pemangku kepentingan, prioritas berdasarkan urgensi dan potensi dampaknya terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Kolaborasi antar instansi pemerintah, non-pemerintah, dan internasional sangat diperlukan untuk mendukung penyediaan dan distribusi sarana serta prasarana yang diperlukan. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti bantuan pemerintah, pengadaan langsung, atau sumbangan dari masyarakat. Pentingnya inventarisasi dan pendistribusian sarana dan prasarana sekolah juga tidak bisa diabaikan, sementara pemantauan dan evaluasi rutin diperlukan untuk menjamin pengelolaan yang efektif dan perbaikan yang tepat waktu. Dengan pendekatan ini, diharapkan kondisi pembelajaran di daerah 3T dapat terus ditingkatkan untuk mendukung masa depan pendidikan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, I. (2004). *Pengelolaan Perlengkapan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanafi, M. (2015). Konsep Dasar Dan Perkembangan Teori Manajemen. *Managemen*, 1(1).
- Huda, N. (2017). Manajemen Pengembangan Kurikulum. In *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 1, Issue 2). Rosdakarya.
<https://doi.org/10.33650/AlTanzim.V1i2.113>
- Matin, N. F. (2016). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nadia Wirdha Sutisna, Anne Effane. (2022). Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana. *Karimah Tauhid* (Volume 1 Nomor 2).
- Nurbaiti. (2015). Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. *Manajer Pendidikan*, 540
- Rahayu Asy'ari (2020). Peran Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *researchgate* at:
<https://www.researchgate.net/publication/341025151>
- Fimi Putera. (2018). *Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3t (Terdepan,terpencil dan Tertinggal) di Kabupaten Mahakam Hulu. Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- Yaya Jakaria. (2019). *Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Daerah 3T. Puslitjakbud*.
- Nur Alfiana Kholizah. 2023. *Analisis Implementasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di MIS Nurul Fadhillah*. *Journal on Education* , Volume 06, No. 01.
- Syahril. 2023. *Implementasi kebijakan program sarjana mendidik daerah terluar tertinggal dan terdepan (sm3t) dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten kepulauan tanimbar provinsi maluku*. *Repository IPDN*.
- Yani tri astuti. 2022. *Implementasi manajemen sarana dan prasarana di sekolah dasar muhammadiyah pringsewu*. Raden Intan Repository.
- Ety Purwaningsih. 2020. *Implementasi manajemen sarana prasarana dalam peningkatan mutu pendidikan pada min di kabupaten magelang*.